

# Diskusi MASTEL : “Kebijakan Tarif Telekomunikasi dan Pengaruhnya Terhadap Iklim Usaha Telekomunikasi di Indonesia”

**XL Conference Room, 15 Juni 2007**

**Gedung Sentra Mulia, Kuningan**

**Jakarta**

Diskusi dibuka oleh Sekertaris Jendral MASTEL, Retno S.Renggana, dan dipandu oleh Bp. Benny Nasution.

Moderator : Saat ini diharapkan peraturan tariff yang dinamis , dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga harga menjadi bisa lebih murah, apakah hal ini juga akan dapat mempengaruhi pricing? . Diskusi ini ialah untuk mendapatkan masukan bagi Rancangan Peraturan Menkominfo sebagai pengganti Peraturan Menkominfo No.12 /PER/M.KOMINFO/2006. yang merupakan peraturan transisi yang dibuat dalam rangka memenuhi pengaturan perhitungan tariff STBS menjadi acuan DirJen Postel/BRTI

Presentasi 1

Kebijakan Tarif Telekomunikasi

Heri Nugroho (BRTI)

- Kebijakan Tarif Telekomunikasi didasari oleh 2 hal yaitu para pengguna dan para operator.
- Yang mempengaruhi biaya telekomunikasi antara lain : koneksi, biaya, daya beli masyarakat, aksesibilitas.
- Dalam masalah tarif ada beberapa variable yang mempengaruhi besarnya tarif.
- Saat ini para operator berlomba-lomba memberikan tariff murah
- Tarif telekomunikasi harus memenuhi kelima unsur (syarat) yaitu : *fair, toward cost, attract investment, rules by international organizations, not be unreasonable.*
- Para operator selalu mempermasalahkan mengenai masalah attract investment.
- Fokus dari regulasi interkoneksi adalah focus kepada masalah pengaturan biaya.
- Permasalahan lebih didominasi penyediaan interkoneksi secara teknis di lapangan.

- Pengaturan biaya interkoneksi sebelum PM. 8/2006 menggunakan skema bagi hasil dari tarif pungut (revenue sharing) mempunyai banyak kelemahan.
- Dari perhitungan interkoneksi yang sudah dilakukan bukan suatu alasan untuk para operator menaikkan tariff.
- Dampak implementasi *cost based interconnection* seharusnya tidak menaikkan tariff pungut telekomunikasi.
- Operator dominant dulu kesulitan dalam masalah *cost based interconnection*.
- Dengan Implementasi regulasi interkoneksi berbasis biaya akan mendorong transparansi kepada masyarakat.
- Trafik PSTN ke seluler tidak lagi mengenal terminology *airtime*.
- Regulator tidak menetapkan besaran tariff melainkan menentukan formulanya.
- Pada tahun 2007 tidak ada kenaikan tariff telepon tetap.
- Perbandingan biaya antara PSTN dan FWA (flexi) sangat mencolok.
- Jumlah pelanggan menjadi terminator trafik ke dalam jaringan telepon tetap.
- Jumlah penyedia FWA membengkak.
- Bagi penyelenggara dominant, mereka tidak diperkenankan menjual dibawah tariff interkoneksi.
- Interkoneksi merupakan faktor dominant namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan tarif.
- Kecenderungan teknologi semakin lama semakin murah.
- Angka sms saat ini dan lima tahun yang lalu masih sama padahal sudah banyak hal yang berubah.
- Dengan implementasi regulasi interkoneksi berbasis biaya akan mendorong transparansi masyarakat, dimana setiap penyelenggara wajib mengumumkan tentang beban tarif yang harus dibayar untuk setiap jenis panggilan, termasuk panggilan interkoneksi.
- Data tarif telepon tetap di Negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia belum berada pada posisi tariff termahal. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan pola pentarifan yang berpadanan (apple to apple).
- Pemerintah tidak dapat mengintervensi penetapan tarif yang telah dibuat oleh operator, namun karena dalam industri telekomunikasi telah terjadi kompetisi, maka dengan sendirinya pengguna layanan telekomunikasi akan memilih operator yang dianggap paling murah dan menguntungkan.

- Dilema orang yang mudah berpindah dari satu operator ke operator yang lain menyebabkan turn cost yang tinggi.
- Pemerintah hanya menetapkan formula untuk tarif sedangkan kewenangan penetapan tariff pungut kepada pelanggan merupakan kewenangan operator telekomunikasi.

## Presentasi 2

Freddy Bain (PT. TELKOM)

- Regulasi tariff merupakan keuntungan bagi market atau industry?
- Untuk perbandingan tarif telepon Indonesia menempati urutan ke 8 setelah India.
- Tarif yang rendah merupakan kebutuhan sendiri bagi PSTN.
- Untuk memenuhi *demand* pelanggan tariff yang murah masih belum mendukung.
- Tarif yang saat ini berlaku antara mobile phone ke mobile phone adalah : 904 rupiah per menit (untuk postpaid) dan 1500 rupiah per menit (untuk prepaid)
- Bagaimana fixed dan mobile dijaga keseimbangannya di market yang sama?
- Bagaimana cara menaikkan profit tanpa menaikkan tarif?
- Tarif retail STJJ offnet tidak ada alasan untuk naik.
- Dampak regulasi tarif offnet : tarif offnet masih dapat dibuktikan sudah jauh keluar dari ternd efisiensi cost technology, tarif offnet masih cenderung pada harga yang mahal dan tidak kompetitif.
- *Mobile network operator* memiliki market power yaitu beberapa keuntungan dipakai untuk memberikan subsidi.
- Beberapa network operator cenderung menaikkan jumlah di POC
- On net dan off net tidak hanya issue dari industri kompetitif.
- Menghilangkan charge tidak hanya tentang costbase dari suatu service tetapi bagaimana servicenya terstandarisasi.
- Harmonisasi dari harga retail dan interkoneksi.

### Presentasi 3

Trisnajaya (INDOSAT)

#### Marketing Cellular Privacy

- Industri seluler saat ini sangat dinamis dan growth pertumbuhan harus dijaga.
- Perspektif dari sisi marketing.
- Di marketing bergerak dari suatu koridor-koridor, ada pemahaman yang harus dipahami yaitu : bagaimana customer mempengaruhi pricing, bagaimana agar suatu perusahaan agar sustainable, tidak bisa asal murah, pergantian pasar, dinamika competitor.
- Change market dynamics : regulatory, technology, economy.
- Customer value dynamics : low end game, price sensitive
- Competitor Dynamics : market masih berkembang, skala ekonomi, kekuatan kompetitif yang kuat, kompetisi meningkat.
- Company Dynamics : pembentukan price
- Untuk memberikan tarif yang murah perusahaan harus yakin bahwa itu dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.
- Regulatory Perspective : Pricing di industri selular tidak akan pernah naik, persaingan dalam industry wireless tidak saja hanya sesama selular saja atau sesama FWA, tetapi FWA dan seluler saat ini telah saling mensubstitusi.
- Diusulkan agar aturan pemerintah : hanya mengatur floor price untuk tarif penggunaan, besar floor prize adalah sebesar biaya interkoneksi, biaya panggilan on net tidak hanya diatur dalam keputusan pemerintah, bentuk pengawasan pemerintah adalah kolektif bukan preventif.

### Presentasi 4

Bambang Irianto (APWI)

#### Kebijakan Tarif Telekomunikasi terhadap Iklim Usaha Wartel di Indonesia

- APWI adalah satu-satunya asosiasi untuk bernaungnya pengusaha wartel.
- Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik yang bersifat sementara ataupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum.
- Yang dilakukan APWI : mensukseskan program pemerintah dan melakukan pembinaan.
- Wartel masih diminati oleh masyarakat yaitu untuk bisnis UKM / Koperasi, Keterbatasan jaringan dan aksesibilitas, telepon umum yang ditunggu untuk pelayanan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Wartel terkesan hanya dimiliki telkom.
- Wartel merupakan bagian dari terminasi.
- Pada kebijakan lama, hak wartel diperoleh dari air time sebesar 10 %, sharing ini telah ditiadakan pada kebijakan baru dan selanjutnya hak wartel memperoleh sebesar 30 % ke operator lainnya setelah dikurangkan biaya interkoneksi terminasi.
- Biaya interkoneksi terminasi (DPI) berbeda tergantung dari letak titik interkoneksi terhadap titik charging.
- Perbedaan biaya air time dengan DPI adalah : Air Time 325 rupiah (malam) dan 406 rupiah (siang).
- Biaya interkoneksi : terminasi dekat 361 rupiah, sedangkan terminasi jauh sebesar 471 rupiah
- Wartel baru bermunculan tanpa melalui kajian bisnis, sementara wartel eksisting semakin terpuruk.
- Keberadaan teknologi baru CDMA dan fleksibilitasnya membuat konsumen wartel berpindah.
- Pengusaha tidak memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen wartel.
- Tarif Fix line di wartel sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan tarif CDMA.
- Tarif wartel sebesar 535 rupiah per menit (peak)
- Kompetisi tarif CDMA, sellular dengan kemudahan aksesnya semakin membuat konsumen meninggalkan wartel.
- Wartel dapat berkembang seiring dengan terciptanya lapangan kerja baru.
- Wartel sebagai reseller perlu kesepakatan dan kesepahaman untuk menciptakan kepanitiaan usaha yang saling menguntungkan.

Tanya Jawab

Q1 = Kenapa Pengaturan tarif harus begitu rumit

A1 =

- Kewajiban pemerintah adalah untuk menetapkan formula
- Tarif interkoneksi harus ada justifikasi akademisnya.
- Interkoneksi perlu diatur, jika tidak akan terjadi chaos.
- Norma-norma internasional harus diperhatikan
- Interkoneksi merupakan jantung dari kompetisi
- Pengaturan tarif tergantung pada pasar dengan ada formulanya.
- Pengawasan harus dilakukan agar pricing tidak mengawasi pasar.

Q2 = Diskriminasi dari FWA dan Fixed Phone karena mendapat fasilitas yang berbeda yang merupakan unfair competition, bagaimana rencana pemerintah untuk menetapkan tarif yang seperti ini? Perlu pengaturan lain bagi jaringan tetap lokal, karena perkembangannya FWA/ CDMA/Flexi sudah bukan fixed lagi, sehingga pentariffannya juga perlu diatur kembali

Q3: APWI, Srijanto : Tariff yang diberlakukan pada masyarakat sudah jelas, dan bagi Wartel, Tekom sudah melewati batas atas, sehingga merugikan bisnis Wartel.

Q4: Mas Wigrantoro :

1. Apakah pemerintah mau untuk tidak mengatur batas atas?
2. Apakah Wartel merupakan operator?

A2 = Herry BRTI

- Jawabnya adalah tidak, pemerintah tidak dapat melepaskan batas atas, dan Wartel bukan operator, tetapi seperti menjadi keagenan dar PT Telkom.
- Sewaktu BRTI didirikan sudah dibuat peraturan tentang FWA
- Tarif spectrum akan diatur tidak lagi 1%
- Pemerintah menginginkan penambahan jaringan local.
- Kewajiban 30% Fixed Phone.
- Tarif sedang dalam pelaksanaan.
- Pemerintah sedang mengkaji UU No 36
- Dalam long run market akan berpindah dari vertical menjadi horizontal.
- Penomoran kode area sedang direview.

- Kewajiban pemerintah menetapkan formula. DPI dalam interkoneksi. Bagi operator yg punya market power hrs submit DPI. Pemerintah harus mengatur spy tidak terjadi Chaos.

A3 : Kusmarihati ,BRTI : Karena ada DPI, jad interkoneksi menjadi transparans. Jika tidak, tidak bisa menengahi interkoneksi. Memang disebutkan bahwa pengaturan tariff salah satunya tergantung dari pasar. Liberalisasi yang berhasil salah satunya Australia. Tariff benar2 hrs diawasi agar tidak terjadi predatory pricing.

Diskusi ditutup oleh moderator :

Benny N ; Kelihatannya, supaya tariff menjadi dinamis dan adil, harus ada keputusan politis. Kalau dilihat, mis. Esia pricingnya fair terhadap WARTEL. Perlu dipertimbangkan, jumlah WARTEL cukup banyak, dan memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Mungkin solusinya harus solusi politis. Diskusi untuk hari ini kita tutup, dan semua paper nanti bisa dilihat di website MASTEL : [www.mastel.or.id](http://www.mastel.or.id).

Jakarta, 15 Juni 2007,

Notulen, MASTEL